



JUMAT, 27 AGUSTUS 2021

Info Langganan: ☎ (0542) - 8520236 Eceran: Rp. 6.000,-

**KEBUJAKAN AGM  
YANG MENUAI  
POLEMIK**

**1** Memerintahkan penutupan aktivitas workover sumur bekas PT Vico Indonesia Company yang dikelola Perumda Benua Taka dengan alasan tidak mewakili pemerintah daerah

**2** Memerintahkan penutupan proyek pengembangan kilang Pertamina Balikpapan (RDMP) di kawasan Lawe-Lawe, PPU dengan alasan tidak menggunakan tenaga kerja lokal

**3** Menyatakan tidak akan lagi mengurus penanganan COVID-19 setelah Kejaksaan Tinggi Kaltim mengusut pembelian bilik disinfektan

**4** Melaporkan Wakil Bupati, Hamdam Pongrewa ke Inspektorat Provinsi Kaltim dengan tuduhan menyalahgunakan kewenangan

**5** Mengancam akan memecat ASN yang menggalang unjukrasa menuntut pembayaran insentif

**6** Melanjutkan pembangunan rumah dinas senilai lebih dari Rp 34 miliar di tengah defisit anggaran dan wabah COVID-19

**BUPATI PENAJAM DAN  
KONTROVERSINYA**

Kabupaten Penajam Paser Utara terus menjadi sorotan. Selain rencana pembangunan ibu kota negara baru, relasi pemimpin daerah dengan aparat di bawahnya juga memantik perhatian.

**SALAH** satunya terkait polemik yang terjadi antara Bupati Abdul Gafur Mas'ud dengan Wakilnya Hamdam Pongrewa. Belakangan juga muncul 'huru-hara' dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati muda itu, baru-baru ini menubar ancaman kepada ASN yang akan menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran insentif.

"Saya suka kalau mereka demo. Kalau sampai seribu orang, saya lebih suka," ucapnya. "Karena akan saya berikan surat cinta dengan pemutusan kerja sebagai ASN," kata AGM, Senin (23/8). Belakangan, setidaknya sampai akhir pekan ini, ancaman bupati sukses meredam rencana aksi.

■ **Baca Bupati.. Hal 3**



**DIRUT** MMP Edy Kurniawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kaltim.

**Siapa Berhak  
Kelola PI Blok  
Mahakam?**

Pengelolaan participating interest (PI) 10 persen di Blok Mahakam masih menyisakan persoalan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beda persepsi. Imbasnya, tak ada blok yang dikelola BUMD Kaltim.

**PEMERINTAH** Kalimantan Timur bersikeras menggunakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 37/2016 tentang ketentuan penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Sebagai payung hukum terkait cara pengelolaan PI. Bahwa, PI Blok Mahakam berhak dikelola oleh pemerintah daerah, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mekanismenya adalah lewat penawaran dari kontraktor kepada pemerintah daerah. Poin ini tertuang dalam pasal 9.

■ **Baca Siapa.. Hal 2**

**Curhat DPRD  
di Tahun Ketiga  
Isran Noor**

**SAMARINDA**-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syafruddin, mengkritik kinerja Gubernur Isran Noor. Di tahun ketiga kepemimpinan bekas Bupati Kutai Timur, "belum Nampak jelas karya monumental yang diwujudkan".



**SYAFRUDDIN.**

Pernyataan Anggota Komisi III itu diungkapkan secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya.

■ **Baca Curhat.. Hal 3**



Sebetulnya ada beberapa poin pelaporan, tapi berfokus pada dua dugaan. Yakni pemerasan dan pengancaman."

**SAUD PURBA**



**AMBYAR...**

**Giliran Irma Dilaporkan Memeras**

Sengketa antara calon Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud dan wanita pengusaha, Irma Suryani memasuki babak baru. Istri perwira menengah Polri itu, diam-diam dilaporkan balik dengan tuduhan ancaman dan pemerasan!

**LAPORAN** itu diungkap Saud Purba selaku pengacara Hasanuddin Mas'ud dan istri, Nurfaidah. Saud yang berbicara pada Rabu (25/8) malam mengatakan, pelaporan terhadap Irma Suryani dilakukan ke Polda Kaltim sejak

Juli 2020. "Sebetulnya ada beberapa poin pelaporan, tapi berfokus pada dua dugaan. Yakni pemerasan dan pengancaman," ungkap Saud Purba.

Menurut Saud, barang berharga yang dirampas berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah dan BPKB mobil atas nama Hasanuddin Mas'ud. "Sertifikat itu (tanah dan bangunan) ada sekitar tujuh buah beserta BPKB kendaraan (mobil)," imbuhnya.

Total aset berharga milik kliennya yang berada di tangan Irma Suryani senilai Rp 16.655.000.000.

Saud mengklaim laporan kliennya sudah ditindaklanjuti penyidik. Polda Kaltim telah menignkatkan berkas perkara pada Senin 23 Agustus lalu.

■ **Baca Ambyar.. Hal 2**



Surat-surat itu juga tidak ada kuasa klien kami untuk menjualnya jadi percuma saja tidak ada gunanya itu surat-surat di klien kami."

**JUMINTAR NAPITUPULU**



**Kaltim Perlu 4 Juta Dosis Vaksin**

Kasus COVID-19 di Kalimantan Timur masih menjadi perhatian karena menjadi daerah dengan penyumbang kasus aktif terbesar di Indonesia. Tentu itu bukan prestasi yang patut dibanggakan.

Untuk menekan penyebaran Corona, Bumi Etam butuh dukungan vaksin dari pemerintah pusat

**MUHAMMAD RAFI'**

**PEMERINTAH** Kalimantan Timur berupaya keras menekan pandemi. Selain menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, upaya lain dengan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat.

"Kita baru di angka 21-an persen. Masih jauh, perlu 4 jutaan dosis lagi," ungkap Padilah Mante Runa, di Podcast Ngopi Sore, Ngobrol Pintar dan Inspiratif, episode "Yuk Ketahui Tentang Vaksin", Kamis (26/8). Padahal ujar Padilah, jumlah



**KEPALA** Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Padilah Mante Runa dan Dokter Spesialis Anak, dr Christie, berbagi informasi di Podcast Ngopi Sore.

vaksin yang tiba di Kaltim hingga 25 Agustus 2021 baru mencapai 220.263 vial. Atau setara 1.329.970 dosis. Semuanya sudah tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Padilah menyebut penyebarannya sudah sesuai dengan instruksi dan kebutuhan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung. Setiap datang, langsung dibagi sesuai data yang dilampirkan oleh Kemenkes untuk masing-masing daerah.

Jumlah vaksin yang sudah tiba hingga saat ini masih jauh dari kata cukup. Masih rendah. Perlu 2,8 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan jumlah masyarakat Kaltim.

■ **Baca Kaltim.. Hal 3**



Nomorsatu Kaltim | nomorsatu\_kaltim  
nomorsatukaltim | nomorsatukaltim.com



**Sungai Tercemar,  
Warga Kubar  
Tuntut Janji  
Perusahaan**



**Bocor  
Booster  
Vaksin  
Pak Isran**



**Iwan Ratman Tak  
Bisa Mengelak,  
Saksi Beberkan  
Bukti Transaksi**



**Hasanuddin  
Mas'ud Buktikan  
Tanda-tangan  
Beda**

## BUPATI

Sambungan halaman 1

Sejumlah pihak menilai perseteruan itu amat menggelikan. "Rakyat seharusnya tak disugui pemandangan demikian," kata Pengamat Sosial dan Budaya, Nasrullah.

Akdemisi Universitas Mulawarman itu berujar, dalam budaya kepemimpinan, tugas pertama pemimpin adalah mengayomi dan menciptakan kepastian kepada pegawai dan rakyatnya.

Komunikasi yang dilakukan pemimpin semestinya mampu menenangkan dan menyejukkan. Bukan malah menebar ancaman. Apalagi kepada bawahannya sendiri.

"Ancaman kepada bawahan yang menuntut haknya adalah praktik kontraproduktif sebagai pemimpin," ujar pengajar Fakultas Ilmu Budaya tersebut.

Apalagi, tambah dia, pegawai atau ASN sejatinya memang berhak menuntut haknya. Ia mengatakan, dalam literasi kultural beragama bahkan ditekankan agar membayarkan hasil kerja seseorang, sebelum peluh 'keringatnya' dari bekerja, mengering dari tubuh.

Nilai moral kepemimpinan seperti itu yang mesti dipegang oleh seorang kepala daerah. "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menciptakan kepastian nasib kepada pengikutnya," ucapnya.

Selain itu, mesti dipahami, kata Nasrullah lagi, dalam literasi budaya kepemimpinan, dikatakan, bahwa pemimpin diuji kualitas dan kapasitasnya justru di saat-saat krisis. Tak terkecuali di tengah krisis pandemi ini.

Menurut Nasrullah, pemimpin mesti mampu menjadi 'problem solver' atau pemberi

jalan keluar kepada setiap pengikut (pegawai) dan rakyatnya, dalam setiap masalah dan kendala yang dihadapi.

Bukan malah menjadi 'problem maker' atau penambah masalah bagi pengikut dan rakyatnya yang sudah semakin kesulitan di tengah pandemi ini.

"Karena, disadari atau tidak, publik, rakyat PPU dan tenaga kesehatan yang belum dibayarkan tunjangan selama beberapa bulan tersebut, akan menilai kualitas dan kapasitas pemimpinnya dari caranya memperlakukan mereka. Hal tersebut penting diketahui oleh para penyelenggara negara dan pejabat publik di PPU, juga di Kaltim dan secara umum di negeri ini," pungkash Nasrullah.

Ia menyalahkan kondisi yang terjadi di daerah yang digadang-gadang bakal jadi ibu kota negara baru. Pasalnya menurut dia, tak elok mempertontonkan keadaan demikian kepada publik.

"Kasihannya juga publik PPU disugui pemandangan kurang sedap begitu," tutupnya.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Hardiansyah Hamzah menyebut perseteruan antara Bupati dan berbagai pihak sebagai pemandangan yang bukan saja menggelikan.

Tetapi sekaligus kontras jika disandingkan dengan informasi bahwa bupati sedang membangun rumah dinas senilai puluhan miliar dengan anggaran pemerintah daerah.

"Ini menggelikan buat saya. Insentif bagi ASN menunggak 3 bulan, tapi malah membangun rumah dinas senilai Rp 34 miliar. Pemandangan yang sangat kontras," tutur Hardiansyah.

Sementara itu, lanjut dia, terkait dengan

ancaman kepada ASN yang berencana menggelar unjuk rasa, dikatakan Hardiansyah, jelas sebagai tindakan pembatasan kebebasan berpendapat yang sejatinya dijamin oleh konstitusi.

Setiap warga negara, menurutnya, berhak menyampaikan pendapatnya dimuka umum, termasuk ASN.

"Jadi ancaman pemecatan bagi ASN yang menggelar demo, adalah wujud tindakan otoriter yang dipertontonkan bupati. Seorang ASN tidak boleh diberhentikan karena alasan berdemo. Kalau itu dilakukan, maka keputusan pemberhentian tersebut bisa diadakan ke KASN dan digugat ke PTUN," tandas Hardiansyah Hamzah.

## \* KURANGI BELANJA LANGSUNG

Awal pekan ini, AGM mengancam akan memutus hubungan kerja ASN yang akan menggelar unjukrasa menuntut pembayaran insentif.

"Lumayan untuk mengurangi belanja langsung saya," katanya. Bupati milenial itu mengaku mendapat informasi soal adanya gerakan menggalang unjuk rasa di hari yang sama.

Ketua DPD Demokrat Balikpapan itu menggangg adanya gerakan unjuk rasa lebih bertujuan menurunkan citra pemerintahannya. "Ternyata ada gerakan di bawah, ada yang menjadi provokator. Agar pemerintahan itu muncul isu yang tidak baik," bebarnya.

AGM memaparkan kondisi keuangan daerah terkini. Bahwa sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sejak pandemi COVID-19 melanda sejak 2020 lalu hingga 2021 ini menyebabkan lambatna dana turun

dari pusat. Nah, itulah yang menyebabkan hal ini terjadi.

"Kita tidak bisa tidak mengerti dengan keadaan kondisi negara. Tentunya dengan kondisi ini, pasti ada keterlambatan dana yang ditransfer dari pusat. Itu juga berpengaruh untuk kita-kita semua. Termasuk ASN dan pengembangan yang lain," jelasnya.

Selain itu, terjadi defisit anggaran. Meski tak disebutkan jumlahnya, diperkirakan ada sekira Rp 550 miliar dari APBD 2021 yang telah disahkan Rp 1,89 triliun itu.

Meski begitu, ia tetap berupaya maksimal. Dengan catatan mesti ada yang dikorbankan. Untuk membiayai hal yang lebih wajib. Khususnya soal pembangunan yang ikut berdampak.

"(Lagipula) insentif itukan sunnah. Al-hamdulillah selama kita menjabat, juga tidak pernah ada keterlambatan gaji pokok. Karena itu sudah kami wanti-wanti kepada BK," sebutnya.

Belakangan, Pemkab PPU berencana membayar insentif ASN dengan cara mengangsur. Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengatakan proses pembayaran sudah dijalankan.

"Kami bayar selama 1 bulan dulu. Untuk yang berikutnya akan dibayarkan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita," ujarnya, Rabu (25/8).

## \* KANTOR PEMKAB DIGUGAT

Selain menghadapi persoalan defisit anggaran, Pemkab PPU kini dihadapkan pada masalah hukum. Sejumlah warga menggugat lahan Kantor Bupati di kawasan Nipah-Nipah. Selain kantor Pemkab PPU, lahan yang

digugat di atasnya telah berdiri berbagai kantor dinas.

Tidak tanggung-tanggung, gugatan perdata yang telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Penajam kali ini terkait tanah seluas 823 hektare.

"Ahli waris menyampaikan bahwa tetap meminta ganti rugi terhadap lahan yang sudah dipakai pemerintah. Disertifikatkan oleh pemerintah. Lahan yang dikuasai Pemkab dan ada bangunannya. Tapi yang kosong, dikembalikan," jelas Kuasa Hukum Rostini dan Bobby Mahmud, Agus Wijayanto. Keduanya merupakan ahli waris lahan Kaco Haji Mahmud.

Pada sidang mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri PPU, kedua pihak belum menyepakati perdamaian. "Belum ada titik temu, hakim masih memberikan waktu 30 hari untuk melakukan mediasi lanjutan," ujar pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu.

Dalam sidang itu Hakim Mediator Agus Ahmad Rofik Al Ghozali SH yang memimpin jalannya sidang menilai penggugat mempunyai itikad baik. Karena penggugat hadir seluruhnya.

Sidang ini merupakan tindak lanjut atas gugatan ke Pengadilan Negeri PPU dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PN.Pnj. Menyatakan bahwa pemilik sebenarnya dari lahan itu ialah Punggawa Lotong pada (18/8/2021).

"Ahli waris menyampaikan bahwa tetap meminta ganti rugi terhadap lahan yang sudah dipakai pemerintah. Disertifikatkan oleh pemerintah. Lahan yang dikuasai Pemkab dan ada bangunannya. Tapi yang kosong, dikembalikan," jelas Agus Wijayanto. \*DAS/RSY/YOS

## BEREDAR DAFTAR DAERAH BOLEH PTM, WAGUB TUNGGU EVALUASI

**SAMARINDA** – Sejumlah daerah di Indonesia diperbolehkan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), menyusul penurunan status PPKM. Dari 10 daerah di Kaltim, ada 4 kabupaten yang mendapat restu menggelar PTM. Yaitu Kabupaten Berau, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan pernyataan resmi secara diplomatik. "Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan masing-masing wilayah sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat," kata Hadi Mulyadi.

Pernyataan itu dikeluarkan usai rapat evaluasi pembukaan sektor pendidikan selama PPKM Bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, melalui video conference, Kamis (26/8).

Hadi Mulyadi mengatakan berdasarkan aturan PPKM terbaru, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Sementara satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Arahan Menko Marves lainnya, lanjut Wagub, untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah harus menjadi prioritas.

"Namun demikian, harus pastikan langkah yang diambil sudah cukup untuk melindungi anak-anak dan orang tuanya dari pandemi. Jadi kita harus evaluasi dengan benar kebijakan yang

diambil dalam PTM dimasa PPKM," ujarnya.

Menko juga meminta Mendikbud melaporkan hasil evaluasi penerapan PTM di level 3 dan 2, termasuk tanggapan dari

Menkes mengenai kemungkinan menerapkan peduli lindungi di lingkungan sekolah, tidak terkecuali tanggapan kepala daerah akan hasil evaluasi penerapan PTM.

"Menko Marves menyatakan penerapan PPKM akan terus dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Setiap kabupaten/kota akan memiliki status level 4-1," jelasnya.

Menurut dia, PPKM selama pandemi, sebagai upaya untuk menyeimbangkan pengendalian pandemi COVID-19 dengan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat. "Pemprov maupun

kabupaten dan kota akan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan PTM memperhatikan kondisi dan situasi di lapangan pada PPKM," pungkashnya. \*PRO/YOS



PEMERINTAH pusat memberikan izin daerah berstatus PPKM Level 1-3 menggelar pembelajaran tatap muka. Ilustrasi PTM di masa pandemi.

DOKUMENTASI

## CURHAT

Sambungan halaman 1

"Kepemimpinan Isran-Hadi udah memasuki tahun ke tiga, namun belum nampak jelas karya yang monumental yang beliau berdua wujudkan," tulisnya.

Justru, menurut Syafrudin, akhir-akhir ini menunjukkan kebijakan arah untuk mewujudkan Kaltim Berdaulat.

"Dan yang paling parah di ujung tahun ketiga memasuki tahun ke empat, komunikasi dua lembaga seajar yang sama-sama memiliki peran strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, Eksekutif – Legislatif, betul-betul terbatas dan cenderung tertutup...."

Ketua Fraksi PKB-Hanura itu memberi catatan kritis terhadap penyampaian dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2021 (KUPA).

"Sampai sekarang belum dilakukan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022 juga belum disampaikan," ungkapnya.

Akibatnya, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran belum bisa berbuat apa-apa akibat keterlambatan ini.

Menurut Syafruddin, dalam PP 12 tahun 2019 dinyatakan, "Pemerintah wajib menyampaikan KUA PPAS minggu ke tiga bulan Juli ke DPRD".

"Dan sekarang sudah memasuki minggu ke empat bulan Agustus...." kata politisi PKB itu.

Anggota Badan Anggaran itu juga mengingatkan masa kerja Sekretaris Provinsi Kaltim, Muhammad Sa'bani yang akan mengahiri masa dinas pada 1 Februari 2022.

"Artinya beliau sebentar lagi memasuki masa purna tugas (pensiun) dan tidak lebih dari 6 bulan. Namun sampai sekarang kami DPRD, dan kita semua belum mendengar ada langkah-langkah dari pemerintah untuk segera membentuk Tim Seleksi Sekda Prov Kaltim," urai Syafruddin.

Ia kembali mengingatkan bahwa kerja timsel panjang, kurang lebih 6 bulan. "Belum lagi mandek di tingkat pusat karena pengangkatan Sekda adalah melalui Kepres, artinya jika tidak segera di bentuk Timsel maka ancaman Penunjukan Ptt. Sekda sulit untuk dihindari." Selain dua persoalan itu, Syafruddin mengungkap 'semua' anggota Pansus dari semua Raperda banyak mengeluhkan ketidak-kooperatifan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pembantu gubernur.

"Kepala OPD banyak yang tidak hadir dalam rapat-rapat jika diundang oleh Pansus dengan alasan Pandemi, bahkan tanpa alasan," begitu curhat Syafruddin.

Hal ini menurut dia, sangat menghalangi percepatan pembahasan Raperda yang diajukan pemerintah maupun raperda inisiatif DPRD. Sampai berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari gubernur.

\*YOS

## KALTIM

Sambungan halaman 1

Itu baru satu dosis saja, berarti perlu 5,7 juta dosis vaksin, untuk dua kali suntik.

Hingga herd immunity atau kekebalan komunal bisa tercapai di Kaltim.

Bahkan dengan kedatangan Presiden Jokowi belum lama ini, dimanfaatkan baik oleh Gubernur Kaltim. "Membujuk" agar pemenuhan vaksinasi untuk Kaltim lebih diutamakan dan diprioritaskan. Setidaknya Kaltim secara keseluruhan bisa melakukan vaksinasi 10-15 ribu dosis perhari. Tentu dengan catatan pemerintah pusat lancar mendistribusikan vaksin ke Kaltim.

Gayung bersambut, distribusi vaksin terus mengalir ke Kaltim. Meski dalam jumlah terbatas. Buktiannya berbagai macam sudah masuk ke Indonesia, dan ke Kaltim khususnya. Seperti CoronaVac dari Sinovac, Moderna buatan Amerika, Astrazeneca dari Inggris hingga Sinopharm. Vaksin terakhir dikhususkan untuk vaksin gotong royong bagi perusahaan swasta untuk karyawannya.

Beda merk, tentu beda jenis kandungan vaksinnya yang dijelaskan oleh Padilah. CoronaVac merupakan vaksin yang menggunakan tubuh virus corona yang sudah dimatikan. Moderna menggunakan RNA virus sebagai kandungan dan Astrazeneca menggunakan DNA virus corona.

"Semua sama saja, sama-sama menciptakan antibodi untuk melawan virus corona," lanjut Padilah lagi.

Padilah pun mengatakan, fungsi vaksinasi mulai terasa dirasakan Indonesia. Cukup membantu menekan jumlah kasus. Meski sempat terjadi lonjakan pada masa gelombang kedua sejak Juni 2021 lalu. Namun berdasarkan studi yang dilakukan, didapati fakta bahwa 99 persen masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi lepas dari "amukan" virus COVID-19 varian delta. Meski satu persen masih ada yang tertular dengan tingkat gejala yang sangat rendah.

Terkait bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan vaksinasi. Padilah menyebut tidak ada ketetapan yang sama di 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Pemprov Kaltim memberikan keleluasaan yang besar bagi kabupaten dan kota untuk berimprovisasi bagaimana menarik minat dan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. "Tidak ada yang seragam untuk pelaksanaan vaksinasi, tergantung daerah masing-masing, kita terus mensupport," ungkap Padilah.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak, dr Christie, pun meminta para orang tua yang memiliki anak usia di antara 12-17 tahun. Untuk ikut sukseskan program vaksinasi dari pemerintah pusat. Terlebih rentang usia tersebut merupakan usia yang sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk menerima suntikan vaksin. Utamanya jenis CoronaVac.

Inipun dianggapnya sebagai upaya agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bisa benar-benar segera dilakukan. Selain disamping mempercepat cakupan

vaksinasi. Yang dikejar hingga 70 persen masyarakat Indonesia.

Persyaratan pun tidak berbeda dengan orang dewasa untuk menjalani vaksinasi bagi remaja. Tentunya tidak dalam keadaan sakit, tidak memiliki penyakit bawaan yang memang dilarang menerima vaksinasi. Selebihnya pun sama saja. Begitupun dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang ditimbulkannya. Seperti demam, nyeri sakit dibagian suntikan, nyeri sendi, mual hingga muntah. Namun itu lumrah terjadi pasca menerima vaksin.

Terkait ketakutan orang tua terhadap pemberian vaksin pada kelompok usia 12-17 tahun dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Christie pun mengatakan hal itu tentunya sangat tidak benar. Malah membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Karena mendapat kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID-19 yang memang masih merajalela ini.

"Malah kearah yang lebih baik, karena tentu sudah melalui beberapa tahapan dan penelitian," ujar Christie yang turut menjadi narasumber Ngopi Sore di Hotel Horison Samarinda.

Namun bagi orang tua yang malah ingin memberikan vaksin COVID-19 pada anaknya, tetapi belum mencukupi usia yang ditentukan. Christie pun mengatakan tidak perlu berkecil hati. Cukup memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada sang buah hati, bagaimana menerapkan hidup yang bersih dan sehat. Karena memang buah hati merupakan peniru yang handal dari

orangtuanya.

Sementara bagi ibu yang sedang menyusui. Kinipun sudah diperbolehkan untuk menjalani proses vaksinasi. Tapi tentu dengan beberapa catatan yang diperbolehkan oleh dokter. Sehingga meskipun menerima suntikan vaksin, tidak perlu ragu memberikan ASI kepada buah hati. Dalam artian turut memberikan kekebalan bagi bayi yang menerima ASI tersebut.

"Para orang tua yang memiliki anak dan sudah memenuhi kriteria wajib vaksin, segera lakukan vaksin dan jangan ragu. Semakin banyak yang divaksin tentu semakin cepat terbentuknya herd immunity. Jangan ragu, karena sudah diteliti dan aman," pungkash Christie.

"Dan cepat capai target akhir tahun ini herd immunity," timpal Padilah.

Diketahui, memang sejak dimulainya vaksinasi pada awal 2021 lalu, Indonesia gencar melakukan vaksin. Mendatangkan vaksin jenis CoronaVac dari Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok. Vaksin ini menjadi yang terbanyak digunakan oleh Indonesia.

Khusus di Kaltim sendiri, pertama kali yang mendapat dosis vaksin ialah duo Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Ini dianggap menjadi solusi penekanan jumlah kasus aktif dan menjadi salah satu upaya keluar dari jeratan COVID-19.

Bahkan Indonesia menjadi negara di Asia yang paling tinggi menggencarkan vaksin. Begitu yang disampaikan Kepala Diana Kesehatan (Kadiskes) Kaltim, Padilah Mante Runa. \*MRF/YOS